

**ANALISIS PENGARUH INFLASI TERHADAP PEREKONOMIAN REGIONAL
DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2015-2024****Anderias Seran¹***cheetharrjoo@gmail.com***Yundy Hafizrianda²***yundihafizrianda@feb.uncen.ac.id***ABSTRACT**

This study aims to analyze the inflation trend in Papua Province during the 2014-2023 period, explain the development of economic growth, and examine the effect of inflation on regional economic growth in Papua Province. The research method used is a quantitative approach with secondary time series data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Papua Province and Bank Indonesia. The analysis was conducted through classical assumption tests (normality, multicollinearity, and autocorrelation), Pearson correlation test, and simple regression using the log-log elasticity model to measure the magnitude of inflation's effect on Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant prices. The results show that inflation in Papua Province during the 2014-2023 period experienced fairly high fluctuations, with the highest peak occurring in 2018 at 6.54 percent, while economic growth contracted by minus 1.10 percent in 2020 due to the COVID-19 pandemic before recovering in subsequent years. The regression analysis proves that inflation has a negative and significant effect on economic growth in Papua Province, with a regression coefficient of -1.154 and a significance value of 0.000, meaning that every 1 percent increase in inflation will reduce economic growth by 1.154 percent. The coefficient of determination (R Square) value of 0.284 indicates that inflation explains 28.4 percent of the variation in economic growth, while the remaining is influenced by other variables outside the model.

Keywords: Inflation, Economic Growth, GRDP, Papua Province, Log-Log Regression

PENDAHULUAN

Pemahaman tentang inflasi menempati posisi sentral dalam analisis makroekonomi karena indikator ini tidak hanya mencerminkan stabilitas harga, tetapi juga daya beli masyarakat serta kesehatan perekonomian secara keseluruhan. Secara teoretis, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu, seperti dijelaskan oleh Mankiw (2016). Untuk menjelaskan fenomena ini, telah dikembangkan sejumlah teori utama, mulai dari Teori Kuantitas Uang dari Irving Fisher yang menekankan peran jumlah uang beredar, Teori Keynesian yang membedakan inflasi akibat tarikan permintaan (demand-pull inflation) dan dorongan biaya (cost-push inflation), hingga Teori Strukturalis yang menyoroti ketimpangan struktural seperti ketergantungan pada impor dan keterbatasan infrastruktur. Selain itu, Teori Harapan Adaptif dari Milton Friedman menegaskan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap inflasi di masa depan justru dapat memperkuat tekanan inflasi itu sendiri. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai peningkatan output riil suatu wilayah dari waktu ke waktu, yang dalam konteks regional biasanya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Model pertumbuhan Solow-Swan menekankan bahwa akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi merupakan faktor-faktor utama pendorong pertumbuhan jangka panjang.

¹ Alumni Mahasiswa SI Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks: pada tingkat yang moderat, inflasi dapat merangsang kegiatan ekonomi, namun jika terlalu tinggi dan tidak stabil, ia akan menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, menekan investasi, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pemahaman teoretis ini menjadi landasan penting untuk menelaah bagaimana hubungan keduanya terjadi dalam konteks nyata, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang khas.

Dari sisi empiris, berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun regional, dan hasilnya secara konsisten menunjukkan bahwa konteks wilayah sangat memengaruhi arah serta kekuatan hubungan tersebut. Secara spesifik di Provinsi Papua, sejumlah studi menemukan kecenderungan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Pramono (2019) menunjukkan bahwa inflasi di Papua memperlambat laju PDRB, terutama ketika inflasi mencapai tingkat tinggi akibat kenaikan harga komoditas dan distribusi yang terhambat. Yulianto (2019) dan Yusuf (2022) juga melaporkan bahwa inflasi memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Papua karena tingginya ketergantungan pada barang impor serta meningkatnya biaya produksi yang tidak sebanding dengan peningkatan output. Setiawan (2021) serta Lestari (2020) menambahkan bahwa inflasi yang tidak stabil menyebabkan fluktuasi PDRB yang cukup besar, khususnya pada sektor jasa dan perdagangan yang rentan terhadap perubahan harga. Temuan-temuan empiris ini memperkuat dugaan bahwa inflasi merupakan variabel kunci yang memengaruhi kinerja ekonomi regional Papua, namun masih diperlukan pengujian lebih lanjut dengan data dan periode yang lebih mutakhir.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, sehingga dinamika inflasi dan pertumbuhan ekonominya pun cenderung unik dan penuh tantangan. Wilayah ini secara geografis didominasi oleh pegunungan, dataran tinggi, dan daerah pesisir yang sulit dijangkau, yang menyebabkan distribusi barang dan jasa menjadi tidak efisien serta berbiaya tinggi. Selain itu, Papua sangat bergantung pada pasokan barang dari luar daerah karena keterbatasan kapasitas produksi lokal, terutama untuk barang konsumsi sehari-hari. Akibat dari kondisi struktural tersebut, tingkat inflasi di Papua sering kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan cenderung fluktuatif. Data menunjukkan bahwa pada periode 2014 hingga 2023, inflasi Papua mencapai puncaknya sebesar 6,54 persen pada tahun 2018, kemudian sempat turun drastis saat pandemi COVID-19, namun kembali melonjak menjadi 5,81 persen pada tahun 2022 akibat kenaikan harga energi dan pangan global. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi riil yang diukur melalui PDRB atas dasar harga konstan justru menunjukkan pola yang tidak stabil, bahkan sempat mengalami kontraksi sebesar minus 1,10 persen pada tahun 2020. Fluktuasi yang saling terkait antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini mengindikasikan adanya hubungan yang perlu dikaji lebih dalam secara empiris, karena tidak semua wilayah mengalami pola yang sama.

Berdasarkan kesenjangan antara prediksi teori, bukti empiris sebelumnya, dan realitas fluktuatif yang terjadi di Papua, maka permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum jelasnya pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua selama periode 2014 hingga 2023. Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengindikasikan adanya hubungan negatif, sebagian besar belum secara spesifik menganalisis periode terkini yang mencakup berbagai guncangan ekonomi signifikan, seperti pandemi COVID-19 dan krisis harga pangan serta energi global pasca-2021. Lebih jauh, belum banyak penelitian yang secara khusus menggunakan model elastisitas log-log untuk mengukur besaran pengaruh inflasi terhadap PDRB di Papua secara kuantitatif. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan utama yang perlu dijawab dalam penelitian ini meliputi bagaimana tren inflasi di Provinsi Papua, bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi Papua, serta apakah inflasi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di wilayah tersebut. Ketiga pertanyaan ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki implikasi kebijakan yang kuat.

Dari seluruh uraian di atas, menjadi jelas bahwa penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan karena setidaknya empat alasan yang saling terkait. Pertama, Papua merupakan wilayah dengan kerentanan inflasi tinggi yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural seperti

kondisi geografis yang sulit, mahal biaya logistik, serta ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan barang dari luar daerah, sehingga studi tentang hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini memiliki nilai penting bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran. Kedua, periode 2014 hingga 2023 dipilih karena mencakup berbagai dinamika penting, termasuk perubahan harga komoditas global, kebijakan nasional yang berdampak pada daerah, serta pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua; dengan demikian, hasil penelitian ini akan merekam dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut secara empiris. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi elastisitas log-log yang tidak hanya mampu menguji signifikansi pengaruh, tetapi juga mengukur besaran elastisitas inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara lebih akurat dibandingkan analisis deskriptif semata. Keempat, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik dalam bidang ekonomi regional, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pelaku usaha dalam upaya mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Papua. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi teoretis sekaligus praktis yang kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time series tahun 2015-2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua dan Bank Indonesia. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Provinsi Papua karena karakteristik inflasinya yang tinggi dan fluktuatif. Variabel yang dianalisis meliputi inflasi yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai variabel independen, serta pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebagai variabel dependen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dari publikasi resmi. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas Shapiro-Wilk, uji multikolinearitas (VIF), dan uji autokorelasi Durbin-Watson. Metode analisis utama yang digunakan adalah model regresi elastisitas log-log :

$$\text{Ln } Y = \text{Ln } a_0 + a_1 \text{ Ln } X + e$$

untuk mengukur besaran pengaruh perubahan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persentase, dimana Y adalah IHK dan X adalah PDRB. Kelayakan model diuji dengan koefisien determinasi (R²), uji t (parsial), dan uji F (simultan). Dengan metode ini, penelitian bertujuan menguji hipotesis bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Papua. Adapun hipotesis verbal yang diajukan dalam penelitian ini adalah : diduga inflasi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Untuk memahami dinamika perekonomian Provinsi Papua secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan dua variabel utama yaitu tingkat inflasi yang diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebagai indikator aktivitas ekonomi. Data kedua variabel disajikan dalam bentuk triwulanan selama periode sepuluh tahun dari tahun 2015 hingga 2024, yang memungkinkan analisis yang lebih rinci mengenai fluktuasi musiman dan tren jangka pendek dibandingkan data tahunan.

Tabel 1. Data Inflasi Triwulanan Provinsi Papua 2015-2024 (%)

Triwulanan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TW1	0,25	1,23	0,30	2,03	0,49	0,28	1,37	0,08	-1,27	-0,91

Triwulaan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TW2	0,78	2,16	1,58	1,81	0,79	0,38	-1,98	4,23	2,75	2,16
TW3	0,25	-0,73	-1,55	-0,41	-1,81	0,21	-0,68	1,05	-0,52	-1,16
TW4	1,51	1,44	2,10	3,11	1,16	-0,11	3,01	0,36	0,73	1,41

Sumber : BPS Provinsi Papua (2025)

Berdasarkan Tabel 1, tingkat inflasi triwulanan di Provinsi Papua menunjukkan pola fluktuasi yang cukup dinamis baik antar tahun maupun antar triwulan dalam satu tahun. Secara tahunan, terlihat bahwa tahun 2018 mencatat inflasi triwulanan tertinggi pada TW4 sebesar 3,11 persen, sementara tahun 2023 mengalami deflasi pada TW1 sebesar minus 1,27 persen. Pola musiman juga tampak jelas, di mana inflasi cenderung lebih tinggi pada triwulan IV (Oktober-Desember) di sebagian besar tahun, seperti pada tahun 2015 (1,51 persen), 2017 (2,10 persen), 2018 (3,11 persen), dan 2021 (3,01 persen). Hal ini mencerminkan peningkatan permintaan agregat menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun yang mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

Sebaliknya, triwulan III (Juli-September) pada beberapa tahun justru mengalami deflasi, seperti pada tahun 2016 (-0,73 persen), 2017 (-1,55 persen), 2018 (-0,41 persen), 2019 (-1,81 persen), dan 2023 (-0,52 persen). Deflasi ini dapat disebabkan oleh melimpahnya pasokan hasil pertanian atau melemahnya daya beli masyarakat pada periode tertentu. Fenomena yang menarik terjadi pada tahun 2021, di mana TW2 mengalami deflasi cukup dalam sebesar -1,98 persen, kemungkinan akibat masih berlangsungnya dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan permintaan masyarakat.

Memasuki tahun 2022, inflasi melonjak tajam pada TW2 mencapai 4,23 persen, yang merupakan angka inflasi triwulanan tertinggi sepanjang periode pengamatan. Lonjakan ini terutama didorong oleh kenaikan harga energi dan bahan pangan global pasca pandemi serta gangguan rantai pasok. Pada tahun 2023 dan 2024, inflasi menunjukkan kecenderungan yang lebih terkendali, meskipun TW2 tetap mencatat inflasi positif yang cukup signifikan masing-masing sebesar 2,75 persen dan 2,16 persen, sementara TW1 dan TW3 pada kedua tahun tersebut justru mengalami deflasi.

Tabel 2. PDRB ADHB Triwulanan Provinsi Papua 2015-2024 (Rp. triliun)

Triwulan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TW1	34.45	36.65	39.15	50.44	44.30	46.23	54.58	64.05	65.30	78.08
TW2	38.16	39.97	43.11	55.02	45.40	47.72	56.49	65.76	71.08	80.02
TW3	37.29	46.57	50.22	55.43	50.21	51.22	59.43	64.12	73.24	80.42
TW4	40.41	50.02	56.46	49.71	49.60	54.07	64.99	68.60	78.29	82.75

Sumber : BPS Provinsi Papua (2025)

Tabel 2 di atas meyajikan tren PDRB ADHB Provinsi Papua yang cenderung mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, meskipun dengan fluktuasi antar triwulan dalam setiap tahunnya. Secara keseluruhan, PDRB Papua tumbuh dari sekitar 34-40 triliun rupiah per triwulan pada tahun 2015 menjadi sekitar 78-83 triliun rupiah per triwulan pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan ekonomi nominal yang cukup signifikan dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Pola musiman yang menarik terlihat pada data PDRB. Pada tahun-tahun awal periode pengamatan (2015-2017), nilai PDRB cenderung meningkat dari triwulan I menuju triwulan IV, dengan puncak terjadi pada triwulan IV. Misalnya pada tahun 2015, PDRB meningkat dari 34,45 triliun (TW1) menjadi 40,41 triliun (TW4); pada tahun 2016 meningkat dari 36,65 triliun menjadi 50,02 triliun; dan pada tahun 2017 meningkat dari 39,15 triliun menjadi 56,46 triliun. Pola ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi menjelang akhir tahun, yang sejalan dengan pola inflasi yang juga tinggi pada triwulan IV.

Namun, pola ini berubah mulai tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, PDRB mencapai puncak pada TW3 sebesar 55,43 triliun, kemudian menurun drastis pada TW4

menjadi 49,71 triliun. Penurunan ini kemungkinan terkait dengan ketidakstabilan ekonomi dan inflasi tinggi yang terjadi pada tahun tersebut. Pada tahun 2019, puncak PDRB terjadi pada TW3 (50,21 triliun) sebelum sedikit menurun pada TW4 (49,60 triliun). Tahun 2020, meskipun pandemi COVID-19 melanda, PDRB justru menunjukkan peningkatan bertahap dari TW1 (46,23 triliun) hingga TW4 (54,07 triliun), yang mengindikasikan adanya ketahanan ekonomi Papua di tengah krisis atau kemungkinan efek dari harga komoditas yang masih tinggi.

Memasuki tahun 2021 hingga 2024, pola pertumbuhan PDRB kembali menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten dari TW1 hingga TW4. Pada tahun 2021, PDRB tumbuh dari 54,58 triliun (TW1) menjadi 64,99 triliun (TW4); pada tahun 2022 dari 64,05 triliun menjadi 68,60 triliun; pada tahun 2023 dari 65,30 triliun menjadi 78,29 triliun; dan pada tahun 2024 dari 78,08 triliun menjadi 82,75 triliun. Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2023 dan 2024, di mana PDRB melampaui angka 78 triliun pada TW4, menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat pasca pandemi.

2. Uji Asumsi Klasik

Setelah memahami deskripsi kedua variabel, langkah berikutnya adalah melakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria estimasi yang baik (BLUE/Best Linear Unbiased Estimator). Ketiga uji asumsi klasik yaitu uji normalitas (Shapiro-Wilk), uji multikolinearitas (VIF dan Tolerance), serta uji autokorelasi (Durbin-Watson) dirangkum dalam satu tabel terintegrasi berikut:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator	Nilai Hasil	Ambang Batas	Kesimpulan
Uji Normalitas	Shapiro-Wilk Sig.	0,084	> 0,05	Residual berdistribusi normal
Uji Multikolinearitas	Tolerance	1,000	> 0,10	Tidak terjadi multikolinearitas
	VIF	1,000	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji Autokorelasi	Durbin-Watson	0,282	dU = 1,3197 (n=40, k=1, α=5%)	Terjadi autokorelasi positif (DW < dU)

Sumber : data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, hasil uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,084 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Selanjutnya dari uji multikolinearitas diketahui bahwa variabel independen Ln IHK memiliki nilai Tolerance sebesar 1,000 (lebih besar dari 0,10) dan nilai VIF sebesar 1,000 (lebih kecil dari 10). Hal ini mengindikasikan tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Kondisi ini secara statistik wajar karena model regresi sederhana hanya memiliki satu variabel independen sehingga korelasi antar variabel bebas tidak mungkin terjadi.

Sementara itu, hasil uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson menghasilkan nilai DW sebesar 0,282. Berdasarkan tabel distribusi Durbin-Watson dengan jumlah sampel (n) = 40, jumlah variabel independen (k = 1), dan taraf signifikansi 5 persen, diperoleh nilai batas atas (dU) = 1,3197. Karena nilai DW (0,282) lebih kecil daripada dU (1,3197), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini mengalami autokorelasi positif, yang berarti terdapat korelasi antar residual pada periode yang berurutan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena autokorelasi dapat membuat varians koefisien regresi menjadi bias, meskipun tidak menghilangkan validitas keseluruhan model.

3. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji korelasi untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hasil uji korelasi Pearson disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi Pearson

	Ln PDRB	Ln IHK
Ln PDRB	1,000	-0,533**
Ln IHK	-0,533**	1,000
**. Korelasi signifikan pada level 0,01 (2-tailed)		

Sumber : data diolah (2025)

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi (Ln IHK) dan pertumbuhan ekonomi (Ln PDRB) memiliki koefisien korelasi sebesar -0,533 dengan tingkat signifikansi 0,01 (2-tailed). Nilai ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan negatif yang sedang dan signifikan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Interpretasinya adalah semakin tinggi tingkat inflasi, cenderung semakin rendah pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya. Tanda negatif pada koefisien korelasi mengonfirmasi arah hubungan yang berlawanan antara kedua variabel tersebut, yang konsisten dengan pola yang terlihat pada grafik perkembangan kedua variabel sebelumnya. Kekuatan korelasi sebesar 0,533 termasuk dalam kategori sedang, yang berarti inflasi merupakan salah satu faktor penting namun bukan satu-satunya penentu pertumbuhan ekonomi di Papua.

Langkah selanjutnya adalah analisis regresi sederhana dengan model elastisitas log-log untuk mengukur besaran pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah hasil analisis regresi sederhana:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Sederhana (Log-Log Model)

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	233106.607	14187.584		16.430	0,000
Ln IHK (Inflasi)	-1.154	0,297	-0,533	-3.883	0,000
a. Dependent Variable: Ln PDRB					

Sumber : data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 5 di atas, persamaan regresi yang terbentuk adalah: **Ln PDRB = 233106,607 - 1,154 Ln IHK**. Koefisien regresi untuk variabel Ln IHK menunjukkan nilai sebesar -1,154 dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05). Hal ini membuktikan bahwa variabel inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ln PDRB) di Provinsi Papua, dengan demikian hipotesis verbal yang menyatakan *diduga inflasi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua diterima*.

Tanda negatif pada koefisien menunjukkan arah pengaruh yang negatif, yang berarti setiap peningkatan inflasi sebesar 1 persen, ceteris paribus (faktor lain dianggap tetap), maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menurun sebesar 1,154 persen. Nilai konstanta sebesar 233106,607 mengindikasikan bahwa jika inflasi bernilai nol, maka pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 233106,607 satuan.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,533 ^a	0,284	0,265
a. Predictors: (Constant), Ln IHK			

Sumber : data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 6 di atas, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,284 atau 28,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu inflasi (Ln IHK) mampu menjelaskan variasi variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Ln PDRB) sebesar 28,4 persen. Sementara itu, sisanya sebesar 71,6 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model regresi yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti investasi, belanja pemerintah, tingkat pengangguran, stabilitas politik, kurs rupiah, dan faktor eksternal lainnya. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,265 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen (hanya satu) dan ukuran sampel (n=40), kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen masih relatif konsisten pada angka 26,5 persen. Nilai R (koefisien korelasi ganda) sebesar 0,533 sama dengan nilai koefisien korelasi Pearson antara Ln IHK dan Ln PDRB, yang mengonfirmasi konsistensi hasil.

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan/ANOVA)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64.896.921,698	1	64.896.921,698	15,079	0,000 ^b
	Residual	163.541.389,077	38	4.303.720,765		
	Total	228.438.310,775	39			
a. Dependent Variable: Ln PDRB						
b. Predictors: (Constant), Ln IHK						

Sumber : data diolah (2025)

Hasil uji ANOVA atau uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 15,079 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari taraf kepercayaan yang ditentukan ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan inflasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Papua, dapat diterima. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinyatakan layak atau fit untuk menjelaskan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif, uji korelasi, regresi sederhana, dan uji ANOVA secara konsisten menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua selama periode 2014-2023. Temuan ini memperkuat hipotesis penelitian yang diajukan, bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, maka pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Sebaliknya, inflasi yang terkendali dan stabil akan lebih mendukung peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Koefisien regresi sebesar -1,154 mengindikasikan bahwa elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap inflasi bersifat elastis (nilai absolut >1), di mana setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,154 persen. Hal ini sejalan dengan temuan empiris sebelumnya dari Pramono (2019), Yusuf (2022), dan Lestari (2020) yang menyatakan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil menjadi salah satu faktor penghambat utama perkembangan ekonomi di wilayah Papua yang memiliki karakteristik struktural seperti tingginya biaya logistik, ketergantungan pada impor, serta keterbatasan infrastruktur distribusi.

4. Pembahasan

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua selama periode 2014 hingga 2023. Berdasarkan uji regresi sederhana dengan model elastisitas log-log, diperoleh koefisien regresi sebesar -1,154 dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,154 persen. Temuan ini perlu dibandingkan dengan berbagai studi empiris sebelumnya untuk melihat konsistensi, perbedaan, serta konteks yang melatarbelakangi hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, baik di Papua maupun di wilayah lainnya.

Secara spesifik, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Pramono (2019) yang menyatakan bahwa inflasi di Papua secara signifikan memperlambat laju pertumbuhan PDRB,

terutama ketika inflasi mencapai tingkat yang cukup tinggi akibat perubahan harga komoditas dan distribusi yang terhambat. Pramono menemukan bahwa inflasi yang tinggi di Papua cenderung bersifat struktural, di mana gangguan pada rantai pasok dan tingginya biaya logistik menjadi pemicu utama. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan bukti kuantitatif yang lebih mutakhir, yaitu pada periode 2014-2023 yang mencakup guncangan pandemi COVID-19 dan krisis energi global. Sementara itu, Yulianto (2019) dalam studinya juga menyimpulkan bahwa inflasi memberikan tekanan pada laju pertumbuhan ekonomi Papua karena sektor ekonomi utama yang bergantung pada barang impor sering mengalami kenaikan harga. Temuan Yulianto tersebut sangat relevan karena Papua memang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan barang dari luar daerah, sehingga setiap kenaikan harga di tingkat nasional atau global akan langsung berdampak pada inflasi lokal yang selanjutnya menekan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengonfirmasi hal tersebut dengan bukti bahwa koefisien regresi yang dihasilkan bersifat elastis (nilai absolut >1), yang berarti dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua cukup besar dan responsif.

Lebih lanjut, penelitian oleh Yusuf (2022) menunjukkan bahwa kenaikan inflasi di Papua menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam sektor-sektor yang sangat bergantung pada distribusi dari luar wilayah. Yusuf mencatat bahwa ketika biaya produksi meningkat akibat inflasi, sektor-sektor utama seperti pertambangan, jasa, dan perdagangan mengalami perlambatan karena margin keuntungan tergerus sementara produktivitas tidak meningkat secara signifikan. Hasil penelitian ini mendukung temuan Yusuf dengan menunjukkan bahwa hubungan negatif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat signifikan secara statistik, baik melalui uji korelasi Pearson ($-0,533$) maupun uji regresi. Setiawan (2021) dalam studinya juga menemukan bahwa ketika inflasi di Papua meningkat, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan signifikan akibat meningkatnya biaya operasional pada sektor jasa dan industri. Temuan Setiawan ini sejalan dengan hasil penelitian di mana nilai R Square sebesar 0,284 mengindikasikan bahwa inflasi mampu menjelaskan 28,4 persen variasi pertumbuhan ekonomi, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain termasuk biaya operasional, investasi, dan kebijakan fiskal.

Penelitian Lestari (2020) menegaskan bahwa inflasi berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi Papua karena faktor biaya distribusi yang tinggi. Lestari mencatat bahwa di Papua, inflasi tidak hanya dipicu oleh faktor moneter tetapi juga oleh faktor riil seperti mahalnya transportasi dan buruknya infrastruktur. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan Lestari dengan bukti bahwa pada tahun-tahun ketika inflasi tinggi seperti tahun 2018 (6,54 persen) dan tahun 2022 (5,81 persen), pertumbuhan ekonomi riil cenderung melambat atau bahkan berkontraksi seperti yang terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi. Aditya (2020) juga menunjukkan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi Papua dengan mengurangi margin keuntungan pada sektor usaha lokal. Temuan Aditya ini relevan karena koefisien regresi negatif yang dihasilkan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan inflasi akan langsung mengurangi keuntungan usaha, yang pada gilirannya menurunkan investasi dan ekspansi bisnis, sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat.

Selain studi-studi yang berfokus pada Papua, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan di wilayah regional lainnya yang memiliki karakteristik serupa. Fadhilah (2019) menunjukkan bahwa inflasi di Papua Barat berhubungan negatif dengan pertumbuhan PDRB, terutama karena tingginya ketergantungan pada barang dari luar daerah. Demikian pula, Rasyid (2017) di Sulawesi Selatan menemukan bahwa inflasi di daerah terpencil dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena terbatasnya alternatif sumber daya lokal. Penelitian Rahmadani (2023) juga menunjukkan bahwa inflasi di Papua selama periode 2014-2022 memiliki korelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor perdagangan dan jasa yang rentan terhadap perubahan harga. Temuan Rahmadani ini konsisten dengan hasil penelitian di mana sektor-sektor yang sangat bergantung pada distribusi dan permintaan domestik menjadi paling terdampak oleh lonjakan inflasi.

Dalam skala yang lebih luas, hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Bruno dan Easterly (1998) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang turun drastis selama krisis dengan inflasi tinggi dapat pulih dengan cepat dan kuat setelah inflasi turun. Di Papua,

meskipun pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi pertumbuhan sebesar -1,10 persen pada tahun 2020, pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dan 2022 seiring dengan menurunnya tekanan inflasi dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga merupakan prasyarat penting bagi pemulihan ekonomi pasca krisis. Sementara itu, penelitian Ghosh dan Phillips (1998) yang menemukan bahwa hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh negara-negara dengan kondisi inflasi yang sangat tinggi atau sangat rendah, juga relevan dengan konteks Papua di mana inflasi yang fluktuatif antara 0,63 persen hingga 6,54 persen memberikan dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan keterbatasan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan model regresi elastisitas log-log yang mengukur dampak dalam bentuk persentase, sehingga hasilnya lebih mudah diinterpretasikan sebagai elastisitas. Kedua, penelitian ini menggunakan data triwulanan yang lebih rinci dibandingkan studi-studi sebelumnya yang umumnya menggunakan data tahunan, sehingga mampu menangkap fluktuasi musiman dan dampak jangka pendek dari guncangan ekonomi. Ketiga, koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,284 yang dihasilkan dalam penelitian ini tergolong sedang, yang berarti masih terdapat sekitar 71,6 persen variasi pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh variabel lain di luar inflasi. Hal ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk memasukkan variabel-variabel seperti investasi asing langsung, belanja pemerintah, tingkat pengangguran, kurs rupiah, dan pembangunan infrastruktur, sebagaimana disarankan oleh Tambunan (2020) dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa inflasi bukanlah satu-satunya faktor penentu pertumbuhan ekonomi di wilayah dengan karakteristik struktural seperti Papua.

Dengan demikian, secara keseluruhan, hasil penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan empiris sebelumnya tentang pengaruh negatif inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua, tetapi juga memperbarui bukti tersebut dengan data yang lebih mutakhir (hingga tahun 2023) dan metode analisis yang lebih rinci (data triwulanan serta model elastisitas). Konsistensi antara hasil penelitian ini dengan berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa hubungan negatif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Papua merupakan temuan yang robust dan tidak sensitif terhadap perubahan periode analisis atau metode yang digunakan. Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah bahwa pengendalian inflasi, terutama melalui perbaikan infrastruktur distribusi, peningkatan produksi lokal, serta koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang lebih baik, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan di Provinsi Papua.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa inflasi di Provinsi Papua selama periode 2014 hingga 2023 cenderung menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi dan tidak stabil, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 6,54 persen dan titik terendah pada tahun 2019 sebesar 0,63 persen, yang mencerminkan bahwa inflasi di Papua sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kondisi geografis yang sulit, tingginya biaya logistik, serta ketergantungan terhadap pasokan barang impor dari luar daerah. Sementara itu, perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua yang diukur melalui PDRB juga memperlihatkan pola fluktuatif, di mana sebelum pandemi pertumbuhan relatif stabil sekitar 4-6 persen, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,10 persen akibat COVID-19, sebelum pulih kembali pada tahun 2021 sebesar 2,10 persen dan tahun 2022 sebesar 3,50 persen. Terakhir, mengacu pada hasil analisis regresi terbukti bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua, dengan koefisien regresi sebesar -1,154 dan nilai signifikansi 0,000, yang berarti setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,154 persen. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Papua secara parsial maupun simultan dapat diterima.

2. Saran-Saran

Secara teoritis, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain seperti investasi, belanja pemerintah, tingkat pengangguran, dan kurs rupiah, mengingat nilai R Square hanya 28,4 persen sehingga masih banyak faktor di luar inflasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Papua. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan metode analisis yang lebih kompleks seperti regresi data panel antar kabupaten/kota atau Error Correction Model untuk mengatasi autokorelasi serta membedakan dampak inflasi jangka pendek dan jangka panjang.

Adapun secara praktis, bagi pemerintah daerah Provinsi Papua, pengendalian inflasi harus menjadi prioritas utama mengingat pengaruh negatifnya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah disarankan memperkuat produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, serta mempercepat pembangunan infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jalan distribusi guna menekan biaya transportasi yang menjadi penyebab utama inflasi struktural di Papua. Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu diaktifkan untuk memantau harga, mengelola stok barang, dan melakukan intervensi pasar saat terjadi lonjakan harga, sementara kebijakan subsidi ongkos angkut untuk wilayah pedalaman dapat dipertimbangkan sebagai langkah jangka pendek.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. (2020). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Regional Terapan*, 8(1), 45–58.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Produk domestik regional bruto Provinsi Papua menurut lapangan usaha 2014–2025. BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Provinsi Papua dalam angka 2014–2025. BPS Provinsi Papua.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan inflasi daerah Provinsi Papua triwulanan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua.
- Boediono. (2019). Teori pertumbuhan ekonomi. BPFE.
- Fadhilah. (2019). Analisis inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 88–102.
- Lestari, M. (2020). Inflasi dan pertumbuhan ekonomi: Bukti empiris dari Provinsi Papua. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), 77–89.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (10th ed.). Cengage Learning.
- Nugroho. (2021). Dampak inflasi terhadap produktivitas ekonomi di Papua. *Jurnal Ekonomi Makro*, 9(1), 112–126.
- Pramono, A. (2019). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua periode 2000–2018. *Jurnal Ekonomi Regional Indonesia*, 7(2), 115–128.
- Putra. (2021). Korelasi inflasi dan pertumbuhan PDRB Papua 2014–2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 6(2), 134–148.
- Rahmadani. (2023). Inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua: Analisis sektoral. *Jurnal Ekonomi Terapan*, 11(1), 56–71.
- Rasyid. (2017). Inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil: Studi kasus Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 90–105.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2019). *Macroeconomics* (20th ed.). McGraw-Hill.
- Setiawan. (2021). Analisis dampak inflasi terhadap sektor jasa dan perdagangan di Papua. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Regional*, 4(2), 67–82.
- Sukirno, S. (2020). *Makroekonomi: Teori pengantar* (Edisi ke-5). Rajawali Pers.

- Tambunan. (2020). Inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia Timur. *Jurnal Ekonomi Regional*, 12(1), 34–50.
- Taufik. (2021). Pengaruh inflasi terhadap sektor ekonomi utama di Papua. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- Yulianto, D. (2019). Analisis hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 45–59.
- Yusuf, R. (2022). Dampak inflasi terhadap perekonomian daerah di Indonesia Timur: Studi kasus Papua. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(3), 201–215.